

Analisis Utang Luar Negeri Indonesia : Antara Resiko dan Kebutuhan

Muhammad Ananda Abdul W¹, Muhammad Rafly Putra H², Muhamad Adrian M³,
Taruna Wijaya⁴

E-mail Korespondensi

¹1111220346@untirta.ac.id

²1111220325@untirta.ac.id

³1111220156@untirta.ac.id

⁴1111220161@untirta.ac.id

ABSTRACT

Every decision has risks attached to it. In addition to risk, there are also reasons that become a necessity to approve the decision. Development carried out by a nation, of course, requires a lot of money. Indonesia needs sustainable development with the aim of improving the economy. Foreign debt is one of the solutions to withstand the needs in terms of economic development and others. Foreign debt affects economic growth through capital accumulation and general productivity growth. The impact of foreign debt on the Indonesian economy is diverse. On the one hand, external debt can be used to finance infrastructure development and other sectors of the economy, thereby promoting economic growth. However, over-reliance on foreign debt can also pose risks to the economy. The purpose of this paper is to measure financing needs, assess risks, optimize the use of funds, and monitor debt policy. This paper uses an empirical method combined with a qualitative approach. The result of this paper is that Indonesia still lacks funds in financing the country's development. therefore Indonesia must take risks, namely by way of foreign debt.

Keywords: *Economic development, foreign debt, industry, infrastructure*

ABSTRAK

Setiap keputusan pasti terdapat resiko yang menyertainya. Selain resiko juga ada alasan yang menjadi kebutuhan untuk menyetujui keputusan tersebut. Pembangunan yang dilakukan oleh suatu bangsa, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Indonesia memerlukan pembangunan yang berkelanjutan dengan tujuan sebagai sarana perbaikan ekonomi. Utang luar negeri menjadi salah satu solusi untuk menahan kebutuhan dalam hal pembangunan ekonomi dan lainnya. Hutang luar negeri mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal dan pertumbuhan produktivitas secara umum. Dampak utang luar negeri terhadap perekonomian Indonesia beragam. Di satu sisi, utang luar negeri dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan sektor perekonomian lainnya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, terlalu bergantung pada utang luar negeri juga dapat menimbulkan risiko terhadap perekonomian. Tujuan penulisan untuk mengukur kebutuhan pembiayaan, mengkaji resiko, mengoptimalkan penggunaan dana, mengawasi kebijakan hutang. Penulisan ini menggunakan metode empiris dipadukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penulisan ini Indonesia masih kekurangan dana dalam pembiayaan pembangunan negara. maka dari itu Indonesia harus mengambil resiko yaitu dengan cara utang luar negeri.

Keyword: *Pembangunan ekonomi, Utang Luar Negeri, Industri, infrastruktur*

Pendahuluan

Sebagai negara berkembang, Indonesia menunjukkan komitmen yang jelas di level nasional untuk mengejar ketertinggalan di berbagai sektor kehidupan. Di sisi lain, guna mewujudkan cita-cita pembangunan ekonomi, dana yang memadai menjadi faktor krusial dalam mendorong kemajuan ekonomi. Dikarenakan modal yang diperlukan terlampau besar dan mustahil disediakan sendiri oleh negara, solusi berupa suntikan dana tambahan dari negara maju atau organisasi internasional dalam bentuk utang luar negeri menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Utang luar negeri dengan pertimbangan yang matang dapat menjadi solusi yang tepat. Sejak era Orde Lama, Indonesia telah menggunakan Strategi Utang Luar Negeri (ULN) untuk memenuhi kebutuhan domestik dan menutupi kekurangan dana pembangunan.



Pada Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 1949, Belanda memberikan pengakuan kedaulatan bagi Republik Indonesia. Namun, pengakuan tersebut disertai dengan syarat yang memberatkan. Syarat yang diajukan Belanda adalah Indonesia harus menanggung seluruh utang yang diwariskan dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Utang tersebut terbilang besar, mencapai 1,13 miliar dolar AS atau setara dengan 4,3 miliar gulden. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi dilematis. Di satu sisi, pengakuan kedaulatan merupakan langkah penting untuk mencapai kemerdekaan penuh. Di sisi lain, beban utang yang besar dikhawatirkan akan menghambat kemajuan dan stabilitas negara yang baru berdiri. Meski demikian, Indonesia akhirnya menerima syarat tersebut. Keputusan

ini diambil dengan pertimbangan matang, dengan harapan bahwa kemerdekaan penuh lebih penting dari pada masalah utang yang dapat diselesaikan di kemudian.

Utang tersebut mulai diwariskan pada pemerintahan Soekarno. Dampaknya defisit APBN membengkak terhitung mencapai 9 miliar. Pada periode 1959-1965, pemerintah menerima pinjaman dari Uni Soviet, US Exim Bank, dan IMF. Hingga akhir pemerintahan Soekarno, utang luar negeri Indonesia sebesar Rp 794 miliar atau setara dengan 2,4 miliar dollar Amerika Serikat. Artinya, sekitar 29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada saat itu. Warisan utang dari era sebelumnya menjadi hambatan bagi pemerintahan Soeharto untuk mendapatkan pemberi pinjaman baru. Hal ini mendorong tim ahli ekonomi Presiden Soeharto untuk mencari solusi. Solusi yang disepakati adalah membentuk Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI), sebuah forum yang terdiri dari 13 negara maju. utang luar negeri pemerintah pada akhir Desember 1997 mencapai 137,42 miliar dolar AS. Pada masa kepemimpinan Soeharto, utang pemerintah mencapai Rp 551,4 triliun atau setara 57,7 persen dari PDB. Masa kepemimpinan Presiden Habibie yang singkat, hanya 17 bulan, diwarnai dengan kenaikan utang luar negeri yang cukup besar. Utang tersebut melonjak sebesar Rp 387,4 triliun, mencapai total Rp 938,8 triliun. Akibatnya, rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) meningkat pesat hingga mencapai 85,4 persen. masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, beban utang luar negeri Indonesia mengalami kenaikan yang cukup besar. Angka utang mencapai Rp 1.271,4 triliun atau setara US\$ 122,3 miliar. Dalam perhitungan rasio utang terhadap PDB, setara dengan 77,2%. Pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri utang pemerintah tercatat Rp 1.298 triliun atau US\$ 139,7 miliar, artinya rasio utang 56,5 persen dari PDB. Estafet kepresidenan berganti ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY berkuasa selama dua periode, yakni periode I dan periode II. Pada akhir kepemimpinan SBY, utang mencapai Rp 2.608,8 triliun atau \$ 209,7 US miliar dengan rasio utang 24,7% dari PDB.

Mulanya, Utang Luar Negeri (ULN) dimanfaatkan sebagai dana tambahan untuk mengatasi kekurangan dana pembangunan yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber pendanaan domestik. Namun, dalam proses pembangunan, utang luar negeri menjadi sumber utama pendanaan defisit anggaran. Persoalan utang luar negeri bagaikan duri dalam daging yang telah lama mendara Indonesia. Menurut Bank Indonesia (2018), utang luar negeri Indonesia pada paruh pertama tahun 2018 mencapai USD 357,5 miliar, setara dengan Rp 4.034,80 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan 13,46% dibandingkan periode yang sama di tahun 2017. Tahun 2013 utang luar negeri Indonesia mencapai 3.632 triliun rupiah. Angka ini terus mengalami kenaikan pada tahun 2014 mencapai 4.049 triliun rupiah.

Sedangkan pada tahun 2015 naik 121 triliun menjadi 4.170 triliun rupiah. Kemudian tahun berikutnya terus mengalami kenaikan hingga yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu mencapai 4.683 triliun rupiah. Memang dari tahun 2014 hingga tahun 2022 terus melonjak dan ini sudah terjadi sebelum adanya pandemi covid 19. Pada 2020, ULN Pemerintah tercatat sebesar US\$ 206,4 miliar atau naik 1,6% secara (yoy).(Udayana 2019). Bulan Maret 2022, posisi dan pertumbuhan utang luar negeri (ULN) pemerintah konsisten mengalami penurunan. Selama era Presiden Joko Widodo, ULN mulai turun sejak 2021 lalu, dan penurunan tahun ini jauh lebih besar. Sampai sejauh ini ULN Indonesia masih dapat dikatakan terkendali. (Putri 2023) Utang pemerintah Indonesia per Juni 2022 mencapai Rp7.123 triliun, mayoritas berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp6.301 triliun atau 88%. Sisanya berasal dari pinjaman, yaitu pinjaman dalam negeri Rp14,74 triliun dan pinjaman luar negeri Rp806,31 triliun. Pinjaman luar negeri terbagi menjadi pinjaman bilateral Rp271,95 triliun, multilateral Rp491,71 triliun, dan dari bank komersial Rp42,66 triliun.

Berdasarkan pemaparan di atas, Utang Luar Negeri (ULN) bagi Indonesia, sebagai negara berkembang, memang menjadi bagian solusi dalam pemenuhan kebutuhan di berbagai sektor pembangunan. Namun, di sisi lain, ULN juga menghadirkan risiko yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai ULN Indonesia, dengan fokus pada risiko dan kebutuhan, menjadi penting untuk memastikan kebijakan pengelolannya efektif dan berkelanjutan. Risiko lain yang perlu dipertimbangkan adalah peningkatan beban pembayaran utang. Seiring dengan bertambahnya jumlah ULN, beban pembayaran utang pun meningkat. Hal ini dapat membebani keuangan negara dan menghambat alokasi sumber daya untuk sektor lain yang lebih produktif. Meskipun memiliki risiko, ULN juga memiliki beberapa manfaat bagi Indonesia. ULN dapat menjadi sumber pembiayaan penting untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, dan pelaksanaan program-program pemerintah. Dengan menyeimbangkan antara risiko dan kebutuhan, diharapkan pemerintah dapat memanfaatkan ULN untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera bagi rakyatnya.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian dengan adanya data-data yang bersumber dari pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melalui pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen seperti jurnal, dokumen dan hasil penelitian yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti. Selanjutnya data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kuantitatif menggunakan konsep yang telah ditetapkan dengan mengkaji peristiwa dan berita yang ada.

Hasil dan pembahasan

1.1 Pembahasan 1

Dalam konteks pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu bangsa, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sumber biaya untuk pembangunan suatu bangsa biasanya tidak hanya berasal dari penggalan sumber daya di negara sendiri. Terkadang setiap negara menggunakan langkah alternatif seperti meminta bantuan hutang luar negeri. Langkah seperti ini, sebenarnya memiliki risiko yang sangat besar. Tetapi, utang luar negeri menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan berkaitan dengan persoalan yang ada. (Nailufarh 2011)

Menurut Vinna (2016) Secara konvensional, "kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk menyejahterakan hidupnya. Kebutuhan mencerminkan perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin di puaskan. Kebutuhan timbul karena adanya kelangkaan barang dan jasa".

Dari penafsiran tersebut, kebutuhan digambarkan sebagai sesuatu yang harus dipenuhi. Indonesia memerlukan pembangunan yang berkelanjutan dengan tujuan sebagai sarana perbaikan ekonomi. Dalam hal ini, posisi Indonesia adalah sebagai negara berkembang yang dimana memiliki keterbatasan modal untuk pembangunan. Sebenarnya Indonesia telah melakukan upaya seperti menggenjot sumber-sumber penerimaan negara melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan non pajak. Faktanya, masih terdapat adanya kesenjangan penerimaan dan pengeluaran atau adanya defisit anggaran pembangunan. (Junaedi Dedi 2017)

Akibat dari hal tersebut, Indonesia akhirnya melakukan kebijakan hutang luar negeri untuk pemenuhan kebutuhan dalam hal pembangunan ekonomi dan lainnya. Utang luar negeri merupakan salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah dan tentunya juga harus mempertimbangkan resiko yang ada. Indonesia tentunya telah lama mengenal mengenai hutang luar negeri ini. Pada saat sebelum merdeka, Indonesia telah memiliki

warisan hutang dari peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Utang luar negeri Indonesia selalu bertambah dari tahun ke tahun dan tentunya hal ini perlu diperhatikan karena merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap remeh.

Pemerintah perlu menimbang apakah utang luar negeri Indonesia bermanfaat atau malah merugikan. Pada umumnya, utang luar negeri ini biasanya melibatkan negara berkembang misal Indonesia kepada negara industri maju. Utang luar negeri ini juga terkadang dimanfaatkan oleh negara industri maju dengan maksud dan tujuan tertentu. Hal ini selaras dengan pendapat Michael Todaro perihal Investment and Aid antara lain dikemukakan alasan negara maju memberikan bantuan terutama karena didalamnya tercakup self-interest politik, strategi dan ekonomi. Kebijakan untuk melakukan utang luar negeri kepada negara industri maju merupakan upaya pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk pembangunan ekonomi, namun dalam hal ini tentunya juga harus memperhatikan antara kebutuhan dan risiko mengenai utang luar negeri. (Darmawan 2022)

Berkaitan dengan peminjaman utang luar negeri ini tentunya terdapat regulasi yang mengatur. Salah satu regulasi yang mengatur mengenai tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. Menurut pasal 1 dalam PP ini, dijelaskan bahwa pinjaman luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia biasanya dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011, pinjaman luar negeri dipergunakan untuk membiayai defisit APBN, membiayai kegiatan prioritas kementerian atau lembaga, mengelola portofolio utang, diteruskanpinjamkan kepada pemerintah daerah, diteruspinjamkan kepada BUMN dan dihibahkan kepada pemerintah daerah.

Per Januari 2020, utang luar negeri Indonesia mencapai 4.817,5 triliun. Hutang luar negeri Indonesia ini cukup besar, namun masih dalam batas normal yang ditetapkan undang-undang. Utang luar negeri negara diharuskan berada di bawah 60% PDB dan pada angka 30% PDB. Tingkat

utang Indonesia dinilai relatif rendah dibandingkan negara tetangga seperti Filipina, Jepang, dan Singapura. Selain itu, defisit dan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil, dan tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun mempunyai utang yang besar, indikator perekonomian Indonesia menunjukkan tingkat pinjaman luar negeri yang terkendali dan berkelanjutan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam konteks pemenuhan kebutuhan melalui hutang luar negeri adalah pelunasan serta bunga yang meningkat setiap tahunnya dan tentunya dapat menjadi beban bagi negara yang bersangkutan. Pemanfaatan utang luar negeri yang telah diterima oleh suatu negara tentunya harus dipergunakan sebaik mungkin. Hutang luar negeri juga sangat penting, dikarenakan presiden yang melanjutkan estafet kepemimpinan nantinya akan banyak terpengaruh dari adanya utang luar negeri yang dilakukan oleh Presiden pada periode sebelumnya. Kapasitas Indonesia dalam konteks pelunasan utang hutang luar negeri pada masa mendatang perlu diperhatikan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan hutang luar negeri. Ketidakmampuan Indonesia dalam melakukan keseimbangan antara melonjaknya beban pengeluaran negara dengan peningkatan penerimaan negara tentunya akan membahayakan kemampuan negara dalam membayar hutang.

Dampak utang secara umum sendiri dapat berbeda-beda tergantung konteksnya, namun secara umum utang dapat menimbulkan dampak positif dan juga negatif. Berikut ini penjabaran dampak positif hutang:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Utang dapat digunakan untuk membiayai investasi yang merangsang pertumbuhan ekonomi, seperti proyek infrastruktur atau ekspansi bisnis.

2) Pembangunan

Utang dapat memberikan negara atau individu dana yang diperlukan untuk berinvestasi dalam pendidikan, layanan kesehatan, dan proyek pembangunan lainnya.

3) Likuiditas

Utang dapat memberikan likuiditas jangka pendek kepada individu atau bisnis, memungkinkan mereka mengelola arus kas dan memenuhi kewajiban keuangan.

Dampak Negatif hutang diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Ketegangan Finansial

Utang yang berlebihan dapat menyebabkan tekanan finansial, sehingga sulit untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan menyebabkan stres.

2) Pembayaran Bunga

Mengumpulkan bunga atas utang dapat meningkatkan jumlah total utang, sehingga mempersulit pembayaran utang secara penuh.

3) Risiko Gagal Bayar

Tingginya tingkat utang meningkatkan risiko gagal bayar, yang dapat berdampak buruk pada peringkat kredit dan stabilitas keuangan.

Singkatnya, meskipun utang dapat menjadi alat keuangan yang berguna bila dikelola dengan baik, penting untuk mempertimbangkan potensi risiko dan dampak yang terkait dengan pinjaman untuk memastikan kesehatan keuangan yang berkelanjutan. Begitu pula dengan Utang luar negeri.

1.2 Pembahasan 2

Pada dasarnya, utang luar negeri mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua saluran, yaitu akumulasi modal dan pertumbuhan produktivitas secara umum. Utang yang moderat dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Model neoklasik tradisional kompatibel dengan mobilitas modal, yaitu kemampuan suatu negara untuk meminjam atau meminjam modal. Negara yang meminjam dari luar negeri untuk menginvestasikan modal dengan produk marjinal lebih besar dari bunga yang dibayarkan akan menerima manfaat. pengaruh akumulasi utang terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teori, utang luar negeri diperlukan pada tingkat yang wajar. Beban utang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sampai pada titik atau batas tertentu. Namun, jika jumlah utang luar negeri melebihi batas tersebut, maka penambahan utang justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara umum, literatur ekonomi mempelajari dan menguji pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tiga saluran, yaitu. dampak kelebihan utang, ketidakpastian dan kendala likuiditas. Utang publik yang berlebihan menimbulkan efek crowding out. Crowding out merupakan bagian dari teori ekonomi yang menggambarkan keadaan pemerintah sedang gencar-gencarnya mencari pendanaan demi belanja sektor publik yang jor-joran. Hal itu akan berdampak seluruh uang yang beredar di suatu negara akan terserap ke kantong pemerintah, dan tak

ada lagi sisa uang beredar untuk mendanai proyek-proyek bisnis sektor swasta. (Junaedi Dedi 2017)

Biasanya, Indonesia menggunakan seluruh utang luar negeri untuk belanja pembangunan. Diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembiayaan berbagai proyek pembangunan dan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang dibuktikan dengan peningkatan nilai PDB dan penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Dalam praktiknya, tidak semua utang luar negeri digunakan untuk biaya pengembangan. Sebagian utang tersebut sebenarnya digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga. Para peneliti mengungkapkan dari hasil penelitiannya bahwa pembayaran utang luar negeri dan bunganya pada dasarnya dibiayai oleh utang baru, sehingga terjadi net transfer sumber daya keuangan dari Indonesia kepada kreditor asing. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan. Pasalnya, sebagian besar dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang seharusnya mendongkrak perekonomian justru diserap oleh belanja rutin yang sebagian besar ditujukan untuk aset modal dan bunga pinjaman. Utang yang tujuan utamanya untuk menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menjadi beban negara ketika utang tersebut dilunasi. (Gilang Ramadani, Amanda Eka Saputri, and Muhammad Yasin 2023)

Kekhawatiran terhadap keberlangsungan utang di masa depan, jika disalahgunakan, tidak menutup kemungkinan utang tersebut akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara bahkan mengancam stabilitas makro ekonomi negara. Pengelolaan utang yang dilakukan negara juga harus diperhatikan. Pada masa Soekarno, utang dikelola secara hati-hati, yaitu untuk pembangunan infrastruktur yang tidak dapat ditanggung oleh pembiayaan dalam negeri. Di bawah kepemimpinan Soeharto, utang luar negeri digunakan untuk belanja pembangunan yang harus melalui prosedur dan manajemen yang ketat. Pada era SBY, utang luar negeri dikelola dengan anggaran yang berorientasi pada keuntungan. Pada era Jokowi, utang luar negeri tidak hanya digunakan untuk defisit anggaran, tetapi juga untuk pembayaran pokok dan bunga utang. Hal ini membuat era Jokowi berbeda dengan era presiden lainnya. Pendapatan dari utang yang digunakan untuk infrastruktur tidak berdampak langsung terhadap perekonomian negara, namun beberapa proyek yang dilaksanakan pemerintah menciptakan lapangan kerja dalam negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak media memberitakan pesatnya arus pekerja Tiongkok ke Indonesia. Artinya utang luar negeri tidak memberikan

kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Mengurangi sumber daya yang dialokasikan untuk investasi, yang dapat meningkatkan pendapatan ekspor. Dampak utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih kecil. Namun, utang yang besar bukan berarti suatu negara bangkrut secara finansial. Sebaliknya, suatu negara tidak bisa menjadi sumber pembiayaan yang dapat mendatangkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam waktu singkat. Dengan kondisi perekonomian Indonesia dan juga tingkat kemiskinan. Nilai produk nasional bruto cenderung meningkatkan kemiskinan. Meskipun utang luar negeri suatu negara dapat meningkatkan PDB dan mengurangi kemiskinan, namun utang luar negeri tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan utang luar negeri dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Utang pemerintah pasti berdampak pada pertumbuhan perekonomian nasional. Masyarakat tidak akan menentang utang, jika pemanfaatan utang negara dapat memberikan dampak berlipat ganda terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Pernyataan ini disampaikan oleh pakar ekonomiyang menjadi salah satu pembicara pada diskusi panel evaluasi pengelolaan utang negara, Deputi Bidang Keuangan BPKP. Diskusi yang diselenggarakan di Hotel Bumi Karsa Bidakara Jakarta pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 menghadirkan pembicara pakar ekonomi Aviliani dan CEO PT Pefindo Kahlil Rowter. Pembicaraanya adalah direktur obligasi pemerintah pada departemen pengelolaan utang utama kementerian. Dana Bhimantara Widyajala. Diskusi panel ini merupakan tinjauan kedua terhadap pengelolaan utang pemerintah BPKP atas permintaan Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, dan Easter Suzetta, Kepala Bappenas. Dalam sambutan pembukaannya, Deputi Direktur Keuangan BPKP Binsar H Simanjuntak berharap diskusi panel ini dapat berimbang dan memperkuat hasil penilaian BPKP. Menurutnya, hasil akhir dari evaluasi pengelolaan utang publik adalah memberikan kontribusi pemerintah terhadap efektivitas sektor pemerintah saat ini terhadap kebijakan utang dan rekomendasi kebijakan utang publik ke depan. Aviliani berpendapat, tidak efektifnya utang pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pemahaman pemerintah terhadap pembangunan jangka panjang yang tidak jelas dan fokus. Ia juga mencontohkan negara maju seperti China yang rasio pengeluaran terhadap PDB-nya naik menjadi 8%, padahal Indonesia justru turun menjadi 3%. Artinya belanja sektor publik belum memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut nya, utang yang tinggi tidak

masalah, asalkan memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi, lebih baik dibandingkan utang yang rendah, namun tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, peningkatan penerimaan pajak belum memungkinkan. Ketiga, penggunaan utang pemerintah masih belum memperhitungkan pendapatan dari penggunaan utang tersebut yang digunakan untuk melunasi utang tersebut. "Ke depan, pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan pembelanjaan atau pembelanjaan baik di tingkat negara bagian maupun daerah." kata Aviliani. Menurut dia, belanja lintas departemen/fasilitas/daerah sangat tinggi dan tidak jelas arahnya.

Urgensi utang luar negeri selama ini tidak didukung oleh perencanaan yang matang. Artinya bahwa pemerintah tidak memperhatikan risiko perekonomian negara yang timbul dari utang luar negeri. Pemerintah Indonesia seharusnya mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan melalui utang luar negeri dan lebih mengoptimalkan pinjaman dalam negeri dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN). Namun masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan SUN yang menyebabkan tidak efisien dan buruknya kinerja pengelolaan SUN, antara lain pergerakan harga yang sangat tajam, kurangnya kas SUN, dan konflik kepentingan antar emiten SUN. dan kantor pajak. Menurutnya, pemerintah Indonesia harus melakukan analisis komparatif terhadap biaya dan risiko penggunaan utang luar negeri dan penerbitan SUN.

Penutup

Indonesia merupakan negara berkembang yang berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya di dalam segala aspek kehidupan. Dalam melakukan upaya tersebut, Indonesia telah berupaya seperti misalnya menggenjot sumber-sumber penerimaan negara melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan non pajak. Namun, hal tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Salah satu solusi yang diambil atau kebijakan yang digunakan oleh pemerintah adalah melakukan pinjaman utang luar negeri kepada negara industri maju misalnya china, jepang dan lain sebagainya. Kebijakan melakukan pinjaman hutang luar negeri ini tentunya memiliki dampak positif serta dampak negatif.

Kebijakan luar negeri memang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu melalui akumulasi modal dan pertumbuhan produktivitas secara umum. Indonesia biasanya menggunakan utang luar negeri untuk belanja pembangunan dengan harapan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Faktanya, malah hutang Indonesia tiap tahunnya terus-menerus meningkat. Hal ini tentunya perlu diperhatikan dikarenakan meskipun mampu

memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tetapi hutang luar negeri juga memiliki risiko yang cukup besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa utang luar negeri memang menjadi solusi karena mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tetapi kebijakan melakukan pinjaman utang luar negeri terhadap negara industri maju juga perlu dipertimbangkan secara matang mulai dari dampak dan lainnya dikarenakan memiliki risiko yang besar.

Daftar Pustaka

- Book, Face. 2022. "Benar, Jumlah Utang Indonesia Dari Masa Ke Masa Jabatan Presiden RI." Tempo.Co. 2022. <https://cekfakta.tempo.co/fakta/1858/benar-jumlah-utang-indonesia-dari-masa-ke-masa-jabatan-presiden-ri>.
- Darmawan, Indra. 2022. "Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Akuntansi* 15 (2): 57–69. <https://doi.org/10.24071/jpea.v15i2.5077>.
- Fahlepi, Reza, and Syaparuddin Syaparuddin. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Indonesia." *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter* 7 (3): 137–46. <https://doi.org/10.22437/pim.v7i3.7314>.
- Gilang Ramadani, Amanda Eka Saputri, and Muhammad Yasin. 2023. "Analisi Pengaruh Hutang Luar Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia." *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 1 (3): 94–100. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1128>.
- Hartawan, Tony. 2023. "Risiko Utang Melambung Tinggi." KORANTEMPO. 2023. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/486590/waspada-risiko-utang-luar-negeri-tinggi>.
- Hidayati, Fadhila Wanda, Dicky Jhoansyah, R Deni, and Muhammad Danial. 2021. "Jurnal Indonesia Sosial Sains." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2 (2): 230–40.
- Junaedi Dedi. 2017. "Hubungan Antara Utang Luar Negeri Dengan Perekonomian Dan Kemiskinan: Komparasi Antarezim Pemerintahan." *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 566–68.
- Laili, Nur. 2023. "Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia." The AceHTren. 2023. <https://www.acehtrend.com/news/pengaruh-utang-luar-negeri-terhadap-perekonomian-indonesia/index.html>.
- Liani, Avi. 2009. "Sudahkan Utang Pemerintah Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Nasional?" BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. 2009. <https://www.bpkp.go.id/berita/read/4503/6550/Sudah-Utang-Pemerintah-Berdampak-Pada-Pertentuk-Ekonomi-Nasional>.
- Nailufarh, Qurratul A'yun. 2011. "Menimbang Hutang Luar Negeri Indonesia Bermanfaat Atau Merugikan Pendahuluan," no. 14: 92–99.
- Putri, Aulia Mutiara Hatia. 2023. "Melihat Utang Luar Negeri Indonesia Dari

Tahun Ke Tahun." CNBC INDONESIA. 2023.

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230104110314-128-402679/melihat-utang-luar-negeri-indonesia-dari-tahun-ke-tahun>.

Udayana, Universitas. 2019. "Sekretariat: LMFEB Unud, Jl. P.B. Sudirman,

Denpasar, Bali. Web: [Www.Bemfeb- Unud.Com](http://www.bemfeb-unud.com)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.

Yuliadi, Imamudin. 2017. "Analisis Hutang Luar Negeri Indonesia Pendekatan Keseimbangan Makroekonomi." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 11 (4): 535. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2007.v11.i4.2276>.